

PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA DI DESA HAUNATAS KECAMATAN MARANCAR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Zimmy Swandy^{1*}, Wawan Patriansyah², Ris Arta Lina Tampubolon³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan, Indoensia

²Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indoensia

³Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indoensia

Email Korespondensi : zimmyswandy2121@gmail.com

Abstrak

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayah desa, sehingga pemerintahan desa pada hakikatnya sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kualitas kinerja perangkat desa tidak lepas dari peranan kepala desa sebagai pemimpin desa. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan terdiri dari informan utama, informan kunci dan informan tambahan. Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, teknik pengamatan atau obsevasi, teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan dari Kepala Desa Haunatas dalam meningkatkan kinerja aparatur desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur Desa Haunatas beserta masyarakat menyebutkan bahwa peranan yang dilakukan kepala desa sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa Haunatas berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Peranan; Kinerja; Perangkat Desa.

I. Latar Belakang Penelitian

Kinerja adalah prestasi atau catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dan fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu yang ditentukan. Selain itu kinerja dapat diartikan sebagai hasil atau kerja yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat ditujukan secara nyata

sehingga dapat diukur kinerjanya dalam sebuah organisasi .

Kinerja pemerintah adalah bertanggung jawab yang baik atas kepentingan desa maupun kepentingan masyarakat desa yang secara menyeluruh dengan aparatur desa dalam pelaksanaan peraturan desa yang menjadi acuan dalam masyarakat sesuai peraturan desa yang di

tetapkan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah. Pemerintah desa merupakan aparatur negara yang mempunyai tugas di wilayah desa, Pemerintah desa ini terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Terbentuknya Pemerintahan desa mempunyai tujuan agar suatu desa dapat terkelola dengan baik, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan yang baik.

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 Bahwa wewenang desa tersebut mencakup empat bidang yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelatihan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dari 4 wewenang tersebut pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan tupoksi yang sudah diamanatkan, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan kemandirian dalam desa tersebut.

Desa menjadi basis-basis pembangunan nasional sudah seharusnya semakin diberdayakan, guna mewujudkan desa mandiri. Pernyataan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus, sebagaimana disebutkan pada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, menegaskan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut. Desa yang mandiri merupakan aktualisasi kekuasaan desa menjadi hubungan antar masyarakat desa, pemerintah desa, BPD (badan permusyawaratan desa), serta warga desa. Aktualisasi desa mandiri intinya berkaitan erat dengan kedudukan desa, yang mana desa berkedudukan di daerah kabupaten/kota.

Kelahiran UU Nomor 6 tahun 2014 atau UU desa tersebut membawa dampak besar bagi desa, dimana dengan wewenang yang diberikan diharapkan desa bisa menciptakan desa yang lebih kuat secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Dalam perspektif

pemberdayaan, rakyat diberi kewenangan untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintahan maupun pihak lain, disamping itu mereka wajib aktif berpartisipasi pada proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014, Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat baik atau buruknya pelayanan yang diberikan Perangkat Desa akan sangat tergantung pada Kepala Desanya. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan contoh teladan dan panutan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, maka Perangkat Desa sebagai bawahannya bukan hanya memberikan pelayanan, akan tetapi menghormati serta mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan Kepala Desa, sehingga kondisi seperti ini akan menimbulkan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Pemerintah Desa telah mengatur bahwa Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Sebagai pelaksanaan dari Pemerintah desa Perangkat Desa dapat dikatakan baik apabila kinerja dapat sesuai dengan target dan tanggung jawab yang diembannya. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi tersebut, Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan

baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisanya, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Orientasi kinerja menunjukkan ukuran seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh petugas digunakan untuk melayani pengguna jasa. Idealnya, sumber daya yang dimiliki oleh petugas hanya digunakan untuk melayani masyarakat. Kepala Desa sepenuhnya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan organisasi pemerintah di tingkat Desa.

Faktor yang sangat mendukung Kepala Desa dalam meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dapat dilihat dari cara Kepala Desa tersebut memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para pegawainya, memprioritaskan sarana prasarana untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Kepala Desa yang dapat memahami dan mengerti akan kebutuhan oleh para pegawainya, membuat para pegawai dapat meningkatkan kinerjanya secara maksimal.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam organisasi pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk sekedar mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin, akan tetapi harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya kepada perangkat desa. Hambatan yang ada dalam implikasi kepemimpinan kepala desa dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa pada pelaksanaan program desa antara lain minimnya sumber daya aparatur perangkat desa.

Aparatur pemerintah desa menjadi aktor utama yang berperan penting pada penyelenggaraan pemerintah desa tentunya diharapkan untuk mewujudkan desa yang mandiri. Sebagai aktor yang memegang penyelenggaraan pemerintah desa, aparatur pemerintah desa diharapkan mempunyai

kualitas kinerja yang baik serta memiliki pola pemikiran yang inovatif produktif, efisien, mandiri dan memiliki dedikasi moral yang tinggi. Desa Haunatas ialah desa yang berada pada Kecamatan Marancar mempunyai tantangan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah (*good governance*). Dengan adanya peran dari kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa di desa Haunatas, maka akan berdampak pada kinerja perangkat desa itu sendiri yang kemudian dapat meningkatkan kualitas pelayanan, membuka pemikiran yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah desa, serta kesiapan pemerintah desa dalam menangani hal yang tidak terduga seperti contoh pandemic covid -19 yang terjadi di masa lampau.

Peningkatan kinerja perangkat desa dalam hal ini sangat diperlukan di desa Haunatas, supaya dapat menaikkan kualitas kinerja pelayan di pemerintah desa melalui peran dari Kepala Desa sesuai dengan wewenang yang ada. Upaya Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa pada pemerintahan desa menurut UU No.6 tahun 2014 dengan memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi aparatur pemerintah. Kinerja aparatur selama ini selalu dijadikan sebagai tolak ukur buat menilai keberhasilan suatu organisasi. Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan perlu menerima perhatian yang cukup, dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mendapat pendidikan dan pelatihan, para aparat desa akan lebih memahami maksud, tujuan serta tugas pokok individu yang diarahkan kepada tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penjabaran penulis, dalam pelaksanaan peran Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja Perangkat Desa, masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya: (1) masih kurangnya Sumber Daya Manusia

(SDM) perangkat desa dalam membantu masyarakat karena kurang menguasai teknologi khususnya komputer. Komputer merupakan sarana penunjang kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat karena semua kegiatan lainnya mengutamakan komputer dimana dari 6 perangkat yang ada di desa Haunatas hanya 2 saja perangkat desa yang mampu mengoperasikan komputer dengan cukup baik, hal ini disebabkan selama ini tidak pernah diadakan pelatihan atau bimbingan teknis berkaitan dengan komputer. (2) masih kurangnya kedisiplinan Perangkat Desa yang jarang masuk kerja dimana hal ini mengakibatkan kinerja Perangkat Desa menurun dalam melayani masyarakat. (3) rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa, sesuai dengan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 tentang desa, untuk menjawab tuntutan zaman yang semakin maju menyatakan persyaratan untuk menjabat sebagai perangkat desa berpendidikan minimal sekolah menengah umum atau sederajat. Namun dalam kenyataannya yang terdapat di desa Haunatas masih ada beberapa perangkat desa yang memiliki pendidikan sekolah menengah pertama. (4) kurangnya komunikasi yang berjalan secara intensif antara kepala desa dengan perangkatnya. (5) pelayan publik yang berjalan dengan lamban.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan,” agar dapat membantu pemerintah desa untuk dapat melakukan upaya yang tepat sehingga dapat menciptakan dampak yang baik bagi pembangunan yang ada di desa khususnya pelayanan bagi masyarakat.

II. Pengertian Peran

Pada awalnya kata peran dipakai oleh kalangan drama atau teater yang telah hidup di zaman Yunani kuno atau Romawi yang diperagakan oleh seorang aktor. Kemudian kata peran ini sudah mulai menyebar yang bukan hanya dipakai Dalam kontes drama, tetapi mulai di pakai juga kepada lembaga pendidikan dalam keluarga yakni orang tua.

Peran, adalah tingkah laku atau perilaku yang diharapkan agar seseorang yang Memiliki status dan fungsi tertentu untuk mempengaruhi suatu keadaan dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya agar dapat dikatakan memenuhi peran. Menurut Soerjono Soekanto (2004:243), peran adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang menjalankan suatu peran. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan- perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan dengan wanita harus di sebelah luar.

Menurut Ali (2005:148), peranan adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggun-jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang diadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya .

Menurut Soekanto (2017:211) perihal peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat yang penting sebagai berikut :

1. Peranan tertentu harus dikerjakan jika tatanan masyarakat hendak dipertahankan kelanjutannya
2. Peranan dikatakan sebagai perilaku yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.
3. Peranan disebut seperti perilaku yang diperlukan sebagai struktur sosial masyarakat.
4. Dalam masyarakat kadang kala ada individu-individu yang tidak melaksanakan perannya, peranan yang di perlukan oleh masyarakat atas pelaksanaannya membutuhkan ketaatan.
5. Jikalau semua orang berupaya dan sanggup untuk menjalankan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan yang seimbang.
6. Terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut

2.1 Struktur Peran

Secara umum struktur peran dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Peran formal

Peran formal adalah suatu peran yang Nampak jelas, yakni segala perilaku yang sifatnya itu homogeny. Contohnya seperti dalam keluarga, Ayah dan ibu mempunyai peran sebagai provider (penyedia) , mengatur rumah tangga , merawat anak dan lain- lain.

2. Peran informal

Peran informal adalah peran yang tertutup, yakni suatu peran yang memilikisifat inflisi (emosional) serta umumnya tidak terlihat dipertemukan. Tujuan dari peran informal ini ialah untuk pemunahan kebutuhan emosional

serta juga menjaga keseimbangan dengan keluarga.

2.2 Jenis-jenis Peran

Peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soejono Soekanto, adapun jenis-jenis adalah sebagai berikut :

1. Peran aktif

Peran aktif artinya peran seseorang seutuhnya selalu aktif pada tindakannya disuatu organisasi. Hal tersebut bisa ditinjau atau diukur dari keadaannya serta kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran partisipasif

Peran pasrtisipasif merupakan peran yang dilakukan seseorang sesuai kebutuhan atau hanya pada waktu tertentu saja.

3. Peran pasif

Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. artinya peran pasif hanya digunakan menjadi symbol pada syarat tertentu dalam kehidupan masyarakat.

2.3 Aspek-Aspek Peran

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan

kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dibagi tiga cakupan yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.4 Dimensi Peran

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka orang tersebut menjalankan suatu peran. Adapun dimensi peran dibagi menjadi beberapa dimensi yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai alat komunikasi
Peran digunakan sebagai instrument atau pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani peserta didik, sehingga pandangan dan prefensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan secara baik.
3. Peran sebagai alat strategi
Penganut paham ini mengatakan bahwa peran adalah

strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada suatu paham keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki *kredibilitas*.

4. Peran sebagai terapi

Menurut tanggapan ini, Peran dilakukan sebagai upaya mengobati permasalahan *psikologis* masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

5. Peran sebagai alat sengketa

Peran didayagunakan sebagai cara untuk mengurangi dan menghilangkan konflik melalui usaha pencapaian dari pendapat-pendapat yang ada. Anggapan yang melandasi ini bertukar pikiran dan pandangan yang dapat menambah pengertian dan toleransi serta menghilangkan rasa ketidakpercayaan dan kekacawuan.

2.5 Teori Peran

Teori peran menurut Hakim dkk (2018:1117) Kepala desa memiliki tiga peran sebagai motivator, kepala desa sebagai fasilitator dan kepala desa sebagai mobilisator. Peran kepala desa sebagai motivator yaitu kepala desa memberikan semangat kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya pembangunan. Dengan cara melibatkan masyarakat serta mengajaknya dalam rapat atau pertemuan bersama dengan pemerintah desa untuk membahas pembangunan yang kemudian nantinya masyarakat dapat memberikan usulan atau respon dalam pertemuan tersebut dengan cara menyetujui atau menolak suatu pendapat sebagai bentuk rasa partisipasi. Cara kepala desa untuk memotivasi

masyarakat yakni dengan mengajak masyarakat untuk datang ke setiap pertemuan yang dilaksanakan di desa dengan cara pihak pemerintah desa memberikan undangan kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mengetahui kebutuhan desa dan masyarakat itu sendiri, sekaligus agar masyarakat lebih tahu akan program-program yang dicanangkan desa dalam pembangunan. Kepala desa sebagai fasilitator adalah kepala desa memberikan fasilitas yang layak untuk masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan wadah atau kesempatan kepada rakyat setempat untuk mengusulkan pemikirannya tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa. Masyarakat juga bisa mengutarakan permasalahan yang terjadi di lapangan, pada umumnya masyarakat memberikan usulan tentang pembangunan fisik atau infrastruktur saat pertemuan jadi kepala desa tahu apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Jadi aspirasi dan inspirasi dari masyarakat dapat dimasukkan dalam perencanaan program pembangunan yang ada di desa agar apa yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Teori peran menurut Abu Ahmadani (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status atau fungsi sosialnya. Teori Peran menurut Soejono Soekanto (2002:243), yaitu peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap

sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manager, guru). Teori peran menurut (Role) didefinisikan sebagai harapan sosial dan harapan sosial tersebut bagian dari *slef*. Slef dapat terbentuk dari beberapa peran yang dimainkan oleh individu. Teori peran dapat dimengerti baik dari aspek psikologi maupun sosial pada sifatnya. Serangkaian peran dalam masyarakat membentuk struktur di dalamnya dimana intraksi sosial dapat terjadi secara tertib.

Teori peran menurut Dale (2016) dilihat dari perspektif *symbolic interaction theory*, secara jelas bahwa aspek psikologi dari slef adalah bagian dari peran yang kompleks yang dimainkan dalam hidup. Perilaku kita ada pertimbangan dari konteks tertentu apa yang kita harapkan dalam situasi tertentu. Peran yang dimainkan oleh orang lain dalam kehidupan di masa lalu (masa kecil) merupakan bagian dari pengalaman kita yang sulit diubah di usia dewasa. Hal ini memungkinkan untuk memahami dan melakukan intervensi secara menyeluruh terhadap kesulitan yang di hadapi seseorang dengan memahami peran yang dimainkan oleh orang yang bersangkutan, harapan terhadap peran tersebut dan jaringan orang lain dengan siapa orang tersebut berinteraksi dalam melakukan peran sosial.

Teori peran menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam intraksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam intraksi tersebut
3. Kedudukan Orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi. Peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sarwono di atas dimana seseorang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang atau organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

2.6 Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia kata peranan berasal dari peran, yang mana peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto (2012:212) menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukannya dan peranan adalah suatu bentuk ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling ketergantungan satu sama lainnya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti peranan menemukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

2.6.1 Pembagian Peranan

Menurut Mintzberg dalam buku Konsep Dasar Peranan dan Aplikasinya yang di tulis oleh Miftah Toha (2012) ada tiga peranan yang dilakukan pemimpin dalam organisasinya yaitu.

1. Peranan antar pribadi (*interpersonal role*), dalam peranan antar pribadi atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin, dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan lancar. Peranan oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini di jelaskan sebagai berikut.

- a. Peranan sebagai tokoh (*figurehead*) yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
- b. Peranan sebagai pemimpin, ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang di pimpin dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
- c. Peranan sebagai pejabat perantara (*liaison manager*) disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada di luar organisasinya untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*informational role*) peranan diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam mendapatkan informasi. Mintzberg membagi peranan ini menjadi beberapa peranan seperti :

- a. Peranan pemantau(*monitor*), peranan ini mengidentifikasi seseorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang di terima

dikelompokkan atas lima kategori yaitu:

1. *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi dari semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi misalnya informasi dari langganan, hubungan pribadi pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik dan teknologi yang semua ini bermamfaat bagi organisasi.
3. Informasi dari hasil analisa, semua analisa dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
4. Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
5. Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak tertentu.

3. Peranan mengambil keputusan (*disicional role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian tugas besar atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem

pembuatan strategi organisasinya disebabkan karena:

- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya
- b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasinya.
- c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan satu orang yang dapat melakukan control atas semuanya.

2.7 Pengertian Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh

unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

2.8 Pengertian Aparatur Desa

Perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bintik pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Aparatur sering diartikan sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa dan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dijelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan tangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan Nasional.

2.9 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemimpin desa sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memiliki hak dan tanggung jawab dalam setiap permasalahan yang ada di Desa tersebut. Dalam hal ini peran Kepala Desa di Desa Haunatas sebagai pihak yang berkewajiban. Menurut undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 3, kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 1, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa .

Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa disebutkan pada bagian 2, pasal 6, pada ayat 1, menjelaskan bahwa kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Pasal 2 menyebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam permendagri tersebut disebutkan fungsi kepala desa seperti :

1. Menyelenggarakan pemerintahan, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah .
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana-prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.
3. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat, seperti sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Kepala Desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya .

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna, serta membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

2.10 Pengertian Kinerja

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka di

tuntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja yang baik maka diperlukan penerapan kinerja.

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat *tangible* (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerja itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan/organisasi ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai atau berasal dari luar individu pegawai .

Mangku Prawira dan Hubeis dalam bukunya manajemen mutu sumber daya manusia (2007:153) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan .

Mangku Prawira dan Hubeis (2007: 160) menyebutkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor normatif yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi, dan spiritual. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi, vertikal dan horizontal, kompetensi, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, sistem hukum dan sebagainya .

2.11 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja dalam suatu organisasi memiliki standard kerja yang berbeda

tergantung dari kebijakan perusahaannya, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seperti :

1. Efektivitas dan Efisiensi
Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan.
2. Otoritas dan Tanggung Jawab
Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggungjawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang-tindih tugas. Masing-masing karyawan yang ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Disiplin
Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
4. Inisiatif
Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

2.12 Kinerja Aparatur Desa

Menurut Keban, (2004:46). Kinerja Aparatur Desa merupakan hal penting dan perlu mendapat perhatian yang cukup dalam rangka untuk peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap kinerja aparatur desa akan sangat berguna untuk melihat atau menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan mendorong aparatur untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat yang dilayaninya serta untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Kinerja aparatur desa juga didefinisikan Rue dan Byars (Keban, 2004:76), sebagai tingkat pencapaian hasil (*the degree of accomplishment*) karena itu kinerja pegawai dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Gibson (Pasolong, 2007) mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian kinerja aparatur desa dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat ditafsirkan bahwa aparatur desa erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Kinerja aparatur tidak dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian dalam bekerja saja, tetapi dipengaruhi juga oleh semangat bekerja.

III. Kerangka Berpikir

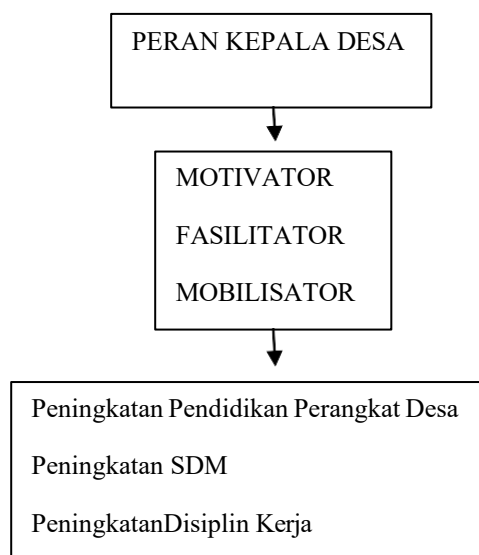
Menurut Sugiyono kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori-teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka berpikir, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu menjelaskan secara teoritis, sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variabel yang diangkat.

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayah desa, sehingga pemerintah desa pada hakikatnya sebagai ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan dibantu dengan

perangkat desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai Peranan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di desa Haunatas Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gambar Kerangka Berpikir



1. Peran sebagai motivator. Dalam dimensi ini peran merupakan suatu dorongan untuk mencapai suatu tujuan yang dilaksanakan dengan baik dan tepat.
2. Peran sebagai fasilitator. Menjadi fasilitator bagaimana kita mampu memimpin memberikan motivasi, kemudahan kepada bawahan sampai dengan arahan yang jelas, ini dilakukan untuk menunjang hasil kerja yang maksimal dan member kenyamanan kepada bawahan agar dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Itu semua dilakukan agar

masyarakat merasa nyaman untuk datang dan menerima pelayanan dikantor Desa.

3. Peran sebagai mobilisator. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah kegiatan guna untuk kepentingan bersama. Dalam pemerintahan desa, kepala desa sebagai mobilisator yang artinya kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong-royong.

IV. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian Kualitatif, deskriptif. Soejono Soekanto (1986:6) Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Soejono Soekanto (1986:250), dalam menganalisis data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

4.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:13), metode adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu

hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari suatu fenomena. Kebijakan atas suatu masalah dapat menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat oleh karena itu peran serta pemerintah untuk memberikan implementasi dari suatu kebijakan, harus sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, untuk dapat menggambarkan peranan kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparat desa di Desa Haunatas, Kecamatan Marancar , Kabupaten Tapanuli Selatan.

4.2 Informan Penelitian

Menurut Arikunto(2013:130) informan adalah keseluruhan subjek penelitian. Informan sangatlah penting dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif. Timbulnya suatu masalah tentu ada gejala dan cara untuk mengatasinya dan orang yang memberikan informasi dapat dikatakan dengan responden apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh peneliti.

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah:

1. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016:139) informan kunci adalah informan yang

memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. informan kunci dalam penelitian ini adalah Latul handa pasaribu selaku Kepala Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Informan utama

Menurut Afrizal (2016:139) informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjaadi informan utama dalam penelitian ini adalah Bona pasaribu dan osmar simanjuntak selaku perangkat desa di Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Informan tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Anto panjaitan dan Sarma Ulina Sormin selaku Masyarakat di Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Gulo (2015:56) adalah teknik maupun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang berupa suatu pernyataan (*statement*) tentang sifat , keadaan , kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti , peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah melakukan Tanya jawab dengan pihak terkait

dalam perusahaan yang berkaitan dengan dengan penelitian ini, untuk memberikan data dan informasi yang tepat.

2. Teknik Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung di tempat kegiatan observasi perusahaan

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dalam bentuk buku-buku teori dan beberapa *literature-literature* yang berhubungan dengan data yang diteliti.

4.4 Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan komunikasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain sugiyono(2014:244). Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2012:255) meliputi :

1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut akan peneliti kumpulkan untuk melakukan pemilihan data.

2. Reduksi Data

Setelah data tersebut dikumpulkan maka peneliti melakukan pemilihan data dengan menyesuaikan sesuai dengan pokok

permasalahan yang diteliti. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah proses penyajian data dalam tahap ini peneliti melakukan analisis data dengan menjabarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, utuh, dan *integrative* yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam mengambil kesimpulan dari data yang ada.

4. Kesimpulan Data

Tahap terakhir ini adalah melakukan penarikan kesimpulan dalam tahap ini peneliti menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Selain memberikan kesimpulan, peneliti juga memberikan saran atau rekomendasi terhadap unit analisis yang diteliti.

V. Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Dapat diperoleh sebuah kesimpulan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa yang sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator. Kepala Desa sudah berperan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan sumber daya manusia bagi aparatur desa seperti privat

(les) komputer, adanya fasilitas cctv, penyediaan laptop serta sepeda motor dalam menunjang kinerja aparatur desa, serta pemecahan masalah yang langsung diberikan oleh kepala desa terhadap masalah yang ada di aparatur desa maupun di masyarakat desa. Hal ini tentunya memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani oleh aparatur desa. Dalam penelitian ini juga dapat ditarik kesimpulan adapun hambatan– hambatan yang dialami oleh kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Desa Haunatas Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

1. Sumber daya manusia yang rendah
2. Masih ada sebagian aparatur desa yang belum mahir dalam mengoperasikan komputer.

VI. Daftar Pustaka

- Apriani Lidia.2020.Skripsi Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman-DIY
- Afrizal (2016:139), Tentang Informan Peneliti
- Arikunto (1993), prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Terhadap Praktek. Jakarta: *Rineka cipta*
- Bastian Indra. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Connie Chairunisa, Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif Depok : PT. Rajagrafindo Persada,2016; 116.
- E. Mulyasa Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya 2004; 107.
- Eko Sutoro, dkk, 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta : FPPD.
- Gibson. (2002). Organisasi Prilaku-Struktur-Proses, Terjemahan, *Edisi v*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Harianta, Jana.2012. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Dalam Jurnal Transformasi, Vol XIV No.22.
- Hasibuan, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka 2007; 845
- Keban, 2004. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Gava Media Yogyakarta
- N. Daljoeni, Interaksi Desa Kota, (Jakarta: Rinoka Cipta, 1987)
- Pasolong, Harbani.2015. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa.
- Simamora, H. 2004. Manajemen Sumberdaya Manusia Edisi III. Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi , Yogyakarta.
- Soekanto.(2002). Teori Peranan Bumi Aksara.
- Soeprihanto 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam.. Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.

Sumaryadi. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. CV Citra Utama

Wirawan. 2009. Evaluasi Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian . Jakarta: Salemba Empat.